



MENTERI PEKERJAAN UMUM

**ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DI DAERAH PERBATASAN KALIMANTAN
DAN NUSA TENGGARA TIMUR DALAM KONTEKS
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

Disampaikan Oleh

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Pada Acara

**Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program
Pembangunan Daerah Perbatasan Terpadu
JAKARTA, 15 NOVEMBER 2005**

*Yang terhormat Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu,
Yang terhormat para Gubernur, para Bupati dan para Walikota
serta Hadirin peserta Rapat Koordinasi Penyusunan dan
Pengendalian Program Pembangunan Daerah Tertinggal*

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, kami menyambut baik permintaan untuk menyampaikan paparan dengan tema "Arah Kebijakan Program Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur Dalam Konteks Pembangunan Daerah Tertinggal"

dalam acara Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kawasan perbatasan pada hakikatnya merupakan kawasan yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan yang langsung berhadapan dengan negara lain. Kawasan yang dimaksud meliputi bagian wilayah provinsi, kabupaten atau kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara atau wilayah negara tetangga. Sejauh ini kawasan perbatasan tersebut yang merupakan kawasan strategis nasional, perkembangannya relatif tertinggal dan sering mengalami kerusakan lingkungan tidak terkendali, sehingga perlu ditangani secara terpadu untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam kerangka pembangunan nasional. Bahkan kondisi saat ini menurut data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 3 dari 5 kabupaten perbatasan negara di Kalimantan Barat, 3 Kabupaten perbatasan negara di Kalimantan Timur, serta 3 Kabupaten perbatasan negara di NTT merupakan daerah tertinggal. Untuk itu diperlukan perhatian untuk menangani kawasan perbatasan dan dalam penanganannya dilakukan pertimbangan atas perwujudan fungsi perbatasan negara dari aspek Keamanan, Kesejahteraan dan Lingkungan Hidup.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam mengembangkan Kawasan Perbatasan dijumpai beberapa tantangan antara lain ;

- Penyebaran penduduk di wilayah perbatasan umumnya jarang dan tidak merata bahkan di Pulau-Pulau Terluar ada yang tidak berpenghuni dan letaknya terpencil. Karakteristik fisik umumnya berupa wilayah pedalaman dengan ketersediaan infrastruktur yang sangat terbatas termasuk infrastruktur di kawasan perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

- Kualitas Sumberdaya Manusia relatif lebih rendah terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat kesehatan yang masih relatif rendah.
- Industri pengolahan belum berkembang, kegiatan perekonomian masih bergantung pada produk mentah atau langsung dari lokasi sumberdaya.
- Pengelolaan Sumberdaya Alam relatif kurang terkendali terutama terkait Eksploitasi Hutan termasuk di Kawasan Lindung, dan Penangkapan Ikan, serta perdagangan satwa langka.
- Lemahnya Sistem Informasi dan Komunikasi menyebabkan Masyarakat Perbatasan Mudah Terpengaruh oleh Informasi dari Luar

Peserta Rakor yang saya hormati,

Pembangunan bidang Pekerjaan Umum 2004-2009 ditujukan agar tersedianya infrastruktur PU yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta lebih sejahtera . Untuk itu arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

- Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang di kawasan perbatasan, daerah terisolir, daerah konflik dan daerah bencana dan rawan bencana untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.
- Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip Good Governance untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis,
- Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah, meningkatkan kualitas

lingkungan perumahan dan permukiman dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

Dalam arahan tersebut ditekankan "basis penataan ruang dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan" karena penataan ruang merupakan prasyarat bagi pembangunan kawasan tersebut, agar terpadu, baik dengan pembangunan sektor lain maupun terpadu dengan wilayah sekitarnya dan diantara pemangku kepentingan. Melalui penataan ruang tersebut diharapkan dapat terwujud ruang perbatasan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dalam pengembangannya kawasan perbatasan ditempatkan sebagai beranda depan dan pintu gerbang ke negara lain, untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan perbatasan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan.

Hadirin yang saya hormati,

Arah kebijakan pembangunan Departemen Pekerjaan Umum tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam **Program Pembangunan 2004-2009** khususnya pada kawasan perbatasan meliputi Penataan Ruang, sumber daya air, penanganan jaringan jalan dan peningkatan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman. disamping itu dikembangkan penerapan teknologi SDA, jalan dan infrastruktur perumahan dan permukiman yang tepat guna dikawasan perbatasan dengan mempertimbangkan bahan lokal dan kemampuan masyarakat setempat.

Peserta Rakor yang saya hormati,

Untuk tahun 2006, Program Pembangunan Departemen Pekerjaan Umum diarahkan sebagai berikut :

Di Bidang Penataan Ruang, Program Penanganan Kawasan Perbatasan mencakup, penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Indikasi Program Strategis Kawasan Perbatasan Negara. Pada saat ini Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Perbatasan Kalimantan dalam proses finalisasi di

sekretariat Kabinet, sedangkan untuk kawasan perbatasan di NTT proses legalisasi menjadi peraturan presiden akan diproses tahun 2006. Pada tahun 2006 akan dilakukan pula Bantuan Teknis antara lain Penyusunan RTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Long Apari – Long Pahangai Kabupaten Kutai Barat, dan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Temajuk Arok Kabupaten Sambas.

Untuk Bidang Sumber Daya Air, dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional akan dilakukan Rehabilitasi irigasi antara lain di Kab. Ngada, Ende, dan Belu, Pembangunan bendungan S. Bolong, Kab. Nunukan, serta Peningkatan Jaringan Rawa di Kab. Sambas sedangkan untuk Pembangunan Jaringan Irigasi melanjutkan penanganan D.I. TOALANG, Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu.

Untuk Bidang Bina Marga, meliputi penanganan jalan di Pulau Sebatik – Kaltim, dan untuk pembangunan dan peningkatan jalan tersebar di Kalbar, Kaltim, dan NTT.

Penanganan Bidang Cipta Karya, meliputi Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman termasuk air bersih dan drainase untuk mendukung pengembangan kawasan dan desa-desa di daerah perbatasan.

Hadirin Peserta rakor yang saya hormati. Sebagai penutup saya ingin menekankan bahwa Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang memerlukan perhatian aspek keamanan, dan mempertimbangkan saat ini perkembangan kesejahteraan masyarakat dikawasan perbatasan relatif tertinggal dan kawasannya juga banyak mengalami kerusakan lingkungan, maka diperlukan penanganan secara terpadu melalui piranti penataan ruang. Untuk itu penyelesaian rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan perlu diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruangnya secara ketat dan diperlukan komitmen para pemangku kepentingan dalam implementasinya.

Hadirin Peserta Rakor Yang Saya Hormati

Demikian sambutan kami pada Rapat Koordinasi ini dengan harapan kiranya berbagai upaya kita dapat segera lebih menyejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 15 November 2005

Menteri Pekerjaan Umum

DJOKO KIRMANTO

Lampiran 1 :

Indikasi Program pembangunan Departemen Pekerjaan Umum Lima Tahun (2004-2009)

Bidang Penataan Ruang

1. Penyiapan Operasionalisasi dan Fungsionalisasi Jakstra dan program Penataan Ruang pulau (9 paket), Pengembangan Kawasan Perbatasan (9 lokasi), dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 67 miliar.
2. Penyusunan NSPM Operasionalisasi Pengembangan Kawasan Tertentu (3 paket), Keterpaduan Pengembangan Kawasan (3 paket), Kawasan Perbatasan (3 paket), Kawasan Tertentu (19 lokasi), , dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 52 miliar (Prog. Pengem. Wilayah Perbatasan/ PWP)
3. Penyiapan Operasionalisasi dan Fungsionalisasi Jakstra dan Program Penataan Ruang Nasional (28 paket/seluruh provinsi), Penataan Ruang Pulau (24 paket/seluruh pulau), Penataan Ruang Propinsi (6 paket), Penataan Ruang Lintas Sektor (4 paket), Keterpaduan Pengembangan Kawasan (7 paket), Pengembangan Kawasan Perbatasan (3 paket), dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 125 miliar

Bidang Sumber Daya Air

1. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 79.450 ha di propinsi Riau Kepulauan, Kalbar, Kaltim, Sulut, Papua dan NTT, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 1.144 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya)
2. Penyediaan air baku sebanyak 1 juta m³/tahun di propinsi Kaltim, Kalbar, Sulut dan NTT, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 178 miliar (dalam penganggaran masuk Program Penyediaan Air Baku)
3. Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip conjuctive use pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil terpencil di 4

propinsi, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 36,5 miliar (dalam penganggaran masuk Program Penyediaan Air Baku).

4. Pembangunan perlindungan pantai di 2 propinsi dan konservasi pulau Karang Nipah, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 211,5 miliar. (dalam penganggaran masuk Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya)

Bidang Bina Marga :

2. Pembangunan jalan kawasan perbatasan 400 Km di Kalbar, 500 Km di Kaltim, 300 Km di NTT, 600 Km di Papua , dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 2,6 triliun (dalam penganggaran masuk Program Pembangunan Jalan dan Jembatan)
3. Penanganan jalan di Kawasan Terisolir/Pulau Kecil 125 km di NAD, 150 km di Sumut, 75 km di Sumbar, 100 km di Riau, 50 km di Jambi, 75 km di Sumsel, 50 km di Babel, 50 km di Bengkulu, 75 km di Lampung, 100 km di Kalbar, 100 km di Kalteng, 75 km di Kalsel, 100 km di Kaltim, 500 km di NTT, 250 km di NTB, 100 km di Sulut, 100 km di Gorontalo, 200 km di Sulteng, 200 km di Sulsel, 150 km di Sultra, 100 km di Maluku, 75 km di Maluku Utara, 200 km di Papua dan Irijaab , dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 4,25triliun (dalam penganggaran masuk Program Pembangunan Jalan dan Jembatan)

Bidang Cipta Karya :

1. Penyediaan PS air minum dan pengelolaan sanitasi di pulau-pulau kecil dan terpencil di 11 propinsi, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 429 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengemb. Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah)
2. Pengembangan PS permukiman persampahan dan drainase di pulau-pulau kecil dan terpencil di 11 propinsi, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 97 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase)
3. Penyediaan PS Air Minum, jalan poros, persampahan, dan drainase pada kws perbatasan di 9 propinsi, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 558,7 miliar (dalam penganggaran masuk Program Rehab Jln dan Jbt, Pengem. Kinerja

Peng. Persampahan dan Drainase, Pengem. Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah)

4. Fasilitasi pengembangan perumahan di 190 kws di daerah tertinggal dan pulau kecil, serta 60 kws dan penyediaan PS Perkotaan dan Perdesaan di daerah perbatasan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 350 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengembangan Perumahan)
5. Peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan melalui program KTP2D di 665 kawasan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 175 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengembangan Perumahan)
6. Pengembangan kapasitas air minum sebanyak 15 ribu l/det. dan dukungan PS air minum untuk kawasan rawan air di sebanyak 5200 kws, dan Pengembangan sistem air limbah di 276 kabupaten, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 4,8 triliun (dalam penganggaran masuk Program Pengemb. Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah)
7. Kegiatan pengembangan PS desa pusat pertumbuhan seperti pembangunan jalan poros desa sepanjang 8000 km, serta pengembangan jalan akses 1200 km mendukung 1 juta rumah dan jalan sekunder perkotaan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 3,28 triliun (dalam penganggaran masuk dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan)
8. Pengembangan PS Desa Agropolitan (jalan poros, terminal, pasar desa/regional) yang tersebar di 31 propinsi, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 745 miliar (Dalam penganggaran masuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya)

Lampiran 2 :

Indikasi Program Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Di Wilayah Perbatasan Tahun 2006 (Kalbar, Kaltim, NTT)

BIDANG PENATAAN RUANG

1. Program Penanganan Kawasan Perbatasan
 - a. Penyusunan RTR dan Indikasi Program Strategis Kawasan Perbatasan Negara. (Rp.750.000.000.-).
 - b. Bantuan Teknis Penyusunan RTR Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Long Apari – Long Pahangai Kabupaten Kutai Barat, Kaltim. (Rp. 650.000.000.-).
 - c. Bantuan Teknis Penyusunan RTR Kawasan Perbatasan Apoping Kabupaten Malinau, Kaltim. (Rp.650.000.000.-).
 - d. Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kaltim. (Rp 700.000.000.-)

2. Program Strategis Nasional
 - a. Penyusunan Rencana Kawasan Andalan Kupang dsk, NTT. (Rp.500.000.000.-)
 - b. Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Temajuk Arok Kabupaten Sambas, Kalbar. (Rp 1.000.000.000.-)
 - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Kawasan Tertinggal. (Rp. 1000.000.000,-)

Bidang Sumber Daya Air

1. Program Ketahanan Pangan Nasional : Rehabilitasi irigasi di Kab. Ngada, Ende, dan Belu – NTT. (Rp. 500.000.000,-)
2. Program Strategis Nasional : Pembangunan bendungan S. Bolong, Kab. Nunukan – Kaltim. (Rp. 15.000.000.000,-)
3. Program Penanganan Kawasan Perbatasan :
 - a. Peningkatan Jaringan Rawa D.R. MALEK-NIBUNG, Kec. Paloh Kab. Sambas – Kalbar. Seluas 1.100.Ha, (Rp 1,534,900.000,-)

- b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. RINTAU, Kec. Sekayam, sanggau – Kalbar, seluas 400Ha. (Rp. 1.040.000.000,-)
- c. Rehab. Jaringan Irigasi D.I. Lubuk Sabuk - Lubuk Tengah, Kec. Sekayam – Kalbar, seluas 352Ha. (Rp. 1,010,000.000,-)
- d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PAUNG PENDING Kec. Ketungau , Kab. Sintang - Kalbar, seluas 500 Ha. (Rp. 1,450,000.000)
- e. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. TOALANG, Kec. Embaloh Hulu (Lanjutan) Kab. Kapuas Hulu, seluas 365 Ha. (Rp. 1,273,500.000)

Bidang Bina Marga

1. Program Penanganan Pulau-Pulau Kecil : Pulau Sebatik – Kaltim. (Rp. 22.600.000.000,-)
2. Program Penanganan Kawasan Perbatasan : Perbatasan di Kalbar. (Rp. 68.000.000.000,-), Perbatasan di Kaltim. (Rp. 226.000.330.000,-), Perbatasan di NTT. (Rp. 22.800.000,-)

Bidang Cipta Karya

Program Penanganan Kawasan Perbatasan : Penyediaan PSD (air bersih, PLP, PSD Perkim) untuk mendukung perkembangan kawasan dan desa-desa di daerah perbatasan (Kep.Riau, Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT, Maluku, Papua) di 27 kws,(Rp. 82.010.000.000,-)